

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan landasan teoritis yang komprehensif dan relevan sebagai dasar pijakan penelitian. Dimulai dengan tinjauan terhadap *grand theory* Pertumbuhan Ekonomi, pembahasan akan berlanjut pada berbagai *middle theory* yang lebih spesifik, guna menjelaskan secara mendalam hubungan antara Investasi Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang digunakan.

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang rusak. Untuk memacu proses Pertumbuhan Ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*).

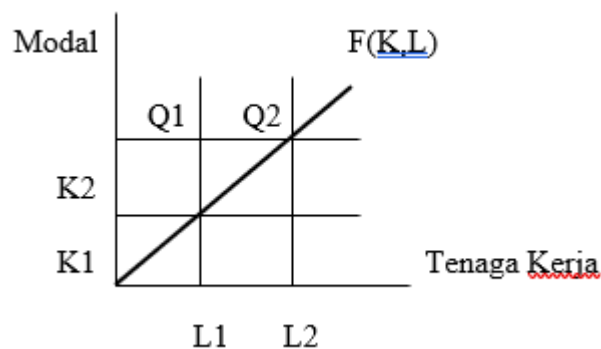
Menurut teori ini analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha

menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang.

Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 1999: 58):

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) barang-barang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*Capital Output Ratio* = COR).

Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Asyad, 1992: 59):



Sumber: Ekonomi Pembangunan (Lincoln Arsyad, 1992)

Gambar 2.1
Fungsi Produksi Harrod-Domar

Untuk menganalisis output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah, untuk output sebesar Q_2 maka hanya diperlukan modal sebesar K_2 dan tenaga kerja sebesar L_2 . Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasional. Jika kita menganggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika tiga rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar satu rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan output total dengan rasio modal output tersebut (Arsyad, 1992: 16).

Selain itu, dalam analisis Harrod mengemukakan tentang instability theorem dimana dalam proses pertumbuhan melekat secara inheren ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kondisi ekuilibrium dan peran asas acceleration. Konsekuensi dari instability theorem adalah diperlukannya intervensi kebijaksanaan negara untuk menanggulangi gangguan ketidakstabilan yang melekat dalam pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan pada analisis Domar berpangkal pada berlakunya asas investment multiplier effect. Analisis mereka terhadap konsep capital output ratio mengambil tempat yang sentral. Jika terjadi penyimpangan laju pertumbuhan investasi yang diperlukan untuk menjaga keadaan ekuilibrium, maka penyimpangan itu akan terus berlangsung. Tidak ada kekuatan tandingan untuk mengembalikan perkembangan keadaan ke dalam jalur ekuilibrium, sehingga diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan tertentu. (Sumitro Djojohadikusumo, 1994).

2.1.2 Investasi Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Investasi Pemerintah Daerah

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 mendefinisikan investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan dana ataupun Barang Milik Daerah (BMD) dengan periode yang lama oleh pemerintah daerah untuk melakukan investasi dengan membeli surat berharga maupun investasi langsung, sehingga dapat mengembalikan nilai pokok yang memiliki manfaat secara ekonomi, sosial, atau manfaat lain dalam periode tertentu.

Manfaat tersebut meliputi:

- a. Laba dengan jumlah tertentu dan periode yang telah ditentukan dalam bentuk deviden, bunga, serta perkembangan nilai pada suatu perusahaan daerah yang memperoleh investasi;

- b. Peningkatan layanan serta laba bagi hasil investasi dalam periode yang telah ditentukan;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam periode yang telah ditentukan;
- d. Peningkatan penyerapan lapangan usaha ataupun tenaga kerja dalam periode yang telah ditentukan; dan
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari hasil investasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah memiliki tujuan agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian suatu daerah, menambah PAD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah dapat dilakukan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada dalam posisi surplus dan penggunaannya telah ditetapkan pada peraturan daerah yang mengatur APBD dan juga adanya Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipakai dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

2.1.2.2 Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan PP Nomor 1 tahun 2008, dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

- b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2.1.2.3 Bentuk dan Lingkup Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 terkait bentuk-bentuk Investasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Investasi Surat Berharga

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan surat berharga adalah saham dan/atau surat utang. Investasi ini dilakukan dengan cara:

- 1. Pembelian Saham

Investasi ini dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas. Pembelian saham dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.

- 2. Pembelian Surat Utang

Investasi ini dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau Pemda lainnya. Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali. Opsi ini merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali apabila Pemda akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo. Pembelian surat utang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

b. Investasi Langsung

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Investasi Langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi Langsung meliputi:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Penyertaan Modal sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

2. Pemberian Pinjaman

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan Pemberian Pinjaman sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

2.1.2.4 Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2012, pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari:

a. Perencanaan

Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan, kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan yang akan disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, pengelola investasi akan menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi yang dilakukan oleh penasehat Investasi Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan investasi Pemda dilaksanakan oleh Pengelola Investasi/ Bendahara Umum Daerah dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga dan dilaporkan kepada kepala daerah. Hasil pengelolaan investasi merupakan pendapatan daerah yang harus dilaporkan dalam laporan kegiatan investasi untuk disampaikan kepada kepala daerah. Laporan tersebut terdiri dari laporan posisi portofolio investasi dan laporan hasil investasi.

c. Pengelolaan Keuangan

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mengatur bahwa penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi yang

dilakukan oleh Pemda dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Demikian pula dengan divestasi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu untuk divestasi yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemda.

Untuk pelaksanaan anggaran mengacu pada mekanisme penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Demikian juga dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

d. Divestasi

PP Nomor 1 Tahun 2008 mendefinisikan divestasi sebagai penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Dalam hal investasi Pemda diperkirakan rugi, Pemda melakukan divestasi. Divestasi Pemda berdasarkan hasil analisis penasihat investasi. Bentuk dan alasan dilakukan divestasi diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Bentuk Investasi dan Divestasi Daerah

Bentuk Investasi	Bentuk Divestasi	Alasan Divestasi
Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham	Penjualan saham	1. Harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi 2. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan

				3. Terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
Investasi Berharga dengan cara pembelian surat utang	Surat Penjualan utang	surat	1. Imbal hasil (<i>yield</i>) diperkirakan turun 2. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan 3. Terdapat kemungkinan gagal bayar	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Penjualan kepemilikan kepada pihak lain.	hak	1. Kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau 2. Tidak sesuai dengan strategi investasi Pemda.	
Pemberian Pinjaman	Pemindahan piutang atau tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.		Tidak Dijelaskan	

Sumber: Permendagri Nomor 52 Tahun 2012

Hasil divestasi yang dilakukan oleh pemda merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi. Adapun biaya pelaksanaan divestasi diperhitungkan berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil divestasi tersebut akan diakui sebagai penerimaan daerah.

e. Pengawasan

Pengelola investasi Pemda memiliki kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah dan dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemda yang terkait dengan dukungan Pemda;

2. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemda dalam jangka waktu tertentu; dan
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 mengatur bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi Pemda. Pengawasan yang dimaksud meliputi pemantauan dan pengendalian. Adapun hasil pelaksanaan pengawasan tersebut dilaporkan kepada kepala daerah.

2.1.2.5 Klasifikasi Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 71 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Investasi berdasarkan jangka waktu yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek

Merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya dijual jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Diturunkan dalam rangka manajemen kas (pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas);

3. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah. Jenis Investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:

1. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Sementara itu, investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi ini digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen.

Investasi permanen adalah Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan (investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali), seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan saluran air, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemda dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Dalam Bagan Akun Standar (BAS), investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi dalam Bagan Akun Standar

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN

		Investasi Jangka Pendek BLUD
		Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
		Investasi dalam Obligasi
		Investasi dalam Proyek Pembangunan
		Dana Bergulir
		Deposito Jangka Panjang
		Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen		Penyertaan Modal Kepada BUMN
		Penyertaan Modal Kepada BUMD
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
		Investasi Permanen Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.1.2.6 Metode Penilaian Investasi

a. Metode biaya

Investasi Pemda yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi Pemda yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemda dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasi Pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemda yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

2.1.2.7 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

2.1.2.8 Teknik Pengukuran

Besar Investasi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, diambil dari realisasi jumlah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam neraca keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing. Untuk mengetahui besar investasi pemerintah setiap daerah dalam periode 2019-2023 dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Investasi Pemerintah Daerah = Investasi Jangka Pendek+Investasi Jangka Panjang di Neraca Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013). Menurut Prof. Simon Kuznets (Todaro, 2000), Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

2.1.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Diperlukan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah, dimana dari indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah serta untuk mengetahui corak Pertumbuhan Ekonomi. Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara (Wilbert et al.,2016). Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dengan menghitung produk nasional/regional bruto dan jumlah penduduk. Secara matematis rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \text{PNB atau PDB} / \text{Jumlah Penduduk}$$

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki Pertumbuhan Ekonomi jika jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan pendapatan per kapita dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi.

2.1.3.3 Teknik Pengukuran

Untuk menilai prestasi Pertumbuhan Ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat

Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$r(t - 1) = \frac{PDRB_t - PDRB(t - 1)}{PDRB(t - 1)} \times 100\%$$

Ket:

$r(t-1)$ = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

$PDRB(t-1)$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah PAD yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim & Kusufi (2014) PAD adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor asli milik daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kontribusi PAD terhadap TPD menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai segala kebutuhan penyelenggaraan operasional pemerintahannya, dan semakin kecil kontribusi PAD terhadap TPD maka semakin besar pula tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan PAD, tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya pembangunan daerah dalam berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2.1.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan;
7. Pajak Parkir.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha

3. Perizinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN;
3. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Penerimaan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan Pendapatan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yaitu:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah;

6. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan; dan
14. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.4.3 Teknik Pengukuran

Untuk menilai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terlebih dahulu dihitung total Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumbernya. Untuk mengetahui total Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PAD} = & \text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Retribusi Daerah} \\
 & + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} \\
 & + \text{Lain – lain PAD yang sah}
 \end{aligned}$$

2.2 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya sekaligus sebagai

bahan perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian serupa berikutnya. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis diantaranya:

1. Penelitian terdahulu dari Gading Chandradiandi dan Khirstina Curry (2024) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Modal Dan Indeks Gini Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013-2020”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD.
2. Penelitian terdahulu dari Agus Indriatno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto (2017) dengan judul “Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Hasilnya menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Penelitian terdahulu dari Lastri Putri BR Sijabat, Raisa Yamani, Ahmad Albar Tanjung, dan Sukardi (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis *Error Correction Model (ECM)*. Hasilnya

menunjukkan bahwa investasi daerah dalam jangka panjang berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Penelitian terdahulu dari Muhammad Feri Romdani, Selamat Rahmadi, dan Siti Aminah (2017) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, belanja daerah dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Penelitian terdahulu dari Meuthia Sri Agustin, Sri Minarti, dan Felisitas Defung (2023) dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kesenjangan Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Penelitian terdahulu dari Yass Andriaa (2019) dengan judul “Pengaruh Faktor Non Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis Common Effect Model (CEM). Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dan faktor ekonomi secara bersama-sama dengan arah yang positif dan signifikan, dengan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 48,29%, sehingga faktor non ekonomi menjadi predeterminan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7. Penelitian terdahulu dari Muhammad Syahroni, dan Oryza Ardhiarisca (2023) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
8. Penelitian terdahulu dari Muhammad Syaifuddin Jihansyah, dan Ni Nyoman Yuliarmi (2019) dengan judul “Pengaruh Investasi, Tingkat Hunian dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Hasilnya menunjukkan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali.
9. Penelitian terdahulu dari Rakhmat Haryono, dan Heri Nugraha (2022) dengan judul “Analisis Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata” Studi Kasus Di Kota Bandung Tahun 2008 - 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap PAD dari peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.
10. Penelitian terdahulu dari Ida Bagus Ketut Yuda Kartana, dan Made Heny Urmila Dewi (2022) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Pertumbuhan

Ekonomi”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Hasilnya menunjukkan bahwa investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

11. Penelitian terdahulu dari Wardatul Husna, Reza Juanda, Saharuddin, dan Murtala (2024) dengan judul “Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Sumatera Utara.
12. Penelitian terdahulu dari Wenni Febriana E. Sueni, Mesak Iek, Rachmaeny Indahyani, dan Antonia Klara (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah berupa nilai aset lancar, nilai aset tetap, nilai aset lainnya, jumlah nilai aset dan penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten jayapura.
13. Penelitian terdahulu dari Hasna Imtiyaz Hanifah, dan Agus Sunarya Sulaeman (2022) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris atas Korelasi Resiprokal”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis data panel. Hasilnya menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi mendukung peningkatan PAD.

14. Penelitian terdahulu dari Sri Muthia Andini, dan Husni Shabr (2024) dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasilnya menunjukkan bahwa investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
15. Penelitian terdahulu dari Risna Wati Sirait (2019) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD.
16. Penelitian terdahulu dari Alisman, Ummu Hanif dan Dedi Sufriadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi sektor publik secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
17. Penelitian terdahulu dari Reza Tianto (2022) dengan judul “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.

18. Penelitian terdahulu dari Zainuddin Rahman dan Sumarni (2024) dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar.
19. Penelitian terdahulu dari Muhammad Danan Riyadi, dan Nenik Woyanti (2022) dengan judul “Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD.
20. Penelitian terdahulu dari Elidawaty Purba dan Ekayanty Manurung (2023) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda *ordinary least square* (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar.
21. Penelitian terdahulu dari Eve Ida Malau (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Pematangsiantar.

Sebagai data pendukung, berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan:

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gading Chandradiandi dan Khirstina Curry (2024) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Modal Dan Indeks Gini Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013-2020”	Variabel Independen: • Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: • Penerimaan Pajak Daerah • Belanja Modal • Indeks Gini Tempat Penelitian: • Kota Surabaya Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan Ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 4 No. 2, Oktober 2024, Hal. 13-20, E-ISSN 2339-0840
2.	Agus Indriatno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto (2017) “Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”	Variabel Independen: • Investasi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Ruang Lingkup Investasi: • Investasi Swasta Variabel Independen: • Pengeluaran Pemerintah • Tenaga Kerja Variabel Dependen: • Pertumbuhan Ekonomi Tempat Penelitian: • Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Teknik Analisis Data:	Investasi swasta berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal FEB UNMUL, P-ISSN 0216-7786 O-ISSN 2528-1097, Volume 13 (2), Hal. 68-77

• Analisis Jalur						
3.	Lastri Putri BR Sijabat, Raisa Yamani, Ahmad Albar Tanjung, Sukardi (2024) “Analisis Pengaruh Investasi Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang”	Variabel Independen: - Investasi Daerah Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data: - Error Correction Model (ECM)	Variabel Independen: - Retribusi Daerah - Belanja Daerah Tempat Penelitian: - Kabupaten Deli Serdang Teknik Analisis Data: - Error Correction Model (ECM)	Investasi daerah dalam jangka panjang berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN 2477-6157; E-ISSN 2579-6534	
4.	Muhammad Feri Romdani, Selamat Rahmadi, dan Siti Aminah (2017) judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi”	Variabel Independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data: - Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: - Belanja Daerah Ruang Lingkup Investasi: - Investasi Swasta Tempat Penelitian: - Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, belanja daerah dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol.6 No. 1 (2017), ISSN: 2303-1255	
5.	Meuthia Sri Agustin, Sri Mintarti, Felisitas Defung (2023) “Pengaruh Inflasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kesenjangan Daerah”	Variabel Independen: - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: - Inflasi - PDRB - Pengeluaran Pemerintah Variabel Dependen: - Tingkat Kesenjangan Daerah Tempat Penelitian: - Provinsi Kalimantan Timur Teknik Analisis Data:	Investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 20 Issue 3 (2023) Pages 395-405 KINERJA: ISSN: 1907-3011 (Print) 2528-1127 (Online)	

				• Analisis Regresi Linear Berganda	
6.	Yass Andriaa (2019) dengan judul “Pengaruh Faktor Non Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Di Indonesia”	Variabel Independen: • Investasi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: • Faktor Non Ekonomi Tempat Penelitian: • 30 Provinsi di Indonesia Teknik Analisis Data: • Analisis CEM	PAD dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dan faktor ekonomi secara bersama-sama dengan arah yang positif dan signifikan, dengan menghasilkan koefisien determinasi sebesar 48,29%, sehingga faktor non ekonomi menjadi predeterminan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Schoolar UNAND
7.	Muhammad Syahrini, Oryza Ardhiarisca (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021”	Variabel Independen: • Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Tempat Penelitian: • 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Sederhana	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 3, No. 1, 2023, {33-41} ISSN 2807-243X (online version)
8.	Muhammad Syaifuddin Jihansyah, Ni Nyoman Yuliarmi (2019) “Pengaruh Investasi, Tingkat Hunian Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Dan IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”	Variabel Independen: • Investasi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: • Tingkat Hunian • Retribusi Daerah Variabel Dependen: • Indeks Pembangunan Manusia Tempat Penelitian: • Kabupaten/Kota Provinsi Bali Teknik Analisis Data: • Analisis Jalur	Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali.	E-Jurnal EP Unud, 11[02] : 719-747 ISSN: 2303-0178

9.	Rakhmat Haryono, Heri Nugraha,; “Analisis Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata”	Variabel Independen: - Investasi Pemerintah Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: - Investasi Swasta - Kunjungan Wisatawan Ruang Lingkup Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Tempat Penelitian: - Kota Bandung Teknik Analisis Data: - Analisis Regresi Sederhana	Investasi pemerintah pada sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap PAD dari peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.	Jurnal Rakhmat Haryono MM 14903
10..	Ida Bagus Ketut Yuda Kartana, Made Henny Urmila (2022) “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Pertumbuhan Ekonomi”	Variabel Independen: - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: - Jumlah Kunjungan Wisatawan Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi Tempat Penelitian: - Kabupaten/Kota Provinsi Bali Teknik Analisis Data: - Analisis Jalur	Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah	E-Jurnal EP Unud,11[09] : 3599-3629 ISSN: 2303-017
11.	Wardatul Husna, Reza Juanda, Saharuddin, Murtala (2024) “Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara”	Variabel Independen: - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: - Pengeluaran Pemerintah Tempat Penelitian: - Provinsi Sumatera Utara Teknik Analisis Data: - Analisis Regresi Linear Berganda	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara	Jurnal Ekonomi Regional Indonesia Unimal, Volume 07 Nomor 1 2024

12.	Wenni Febriana E. Sueni, Mesak Iek, Rachmaeny Indahyani, Antonia Clara (2019) “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura”	Variabel Independen: - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Ruang Lingkup Investasi: - Investasi pemerinrah terhadap aset daerah Teknik Analisis Data: - Analisis Deskriptif	Investasi Pemerintah Daerah berupa nilai aset lancar, nilai aaset tetap, nilai aset lainnya, jumlah nilai aset dan penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten jayapura..	Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume VI No.1, April 2019
13.	Hasna Imtiyaz Hanifah, Agus Sunarya Sulaeman (2022) “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris Korelasi Resiprokal”	Variabel Independen: - Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Tempat Penelitian: - Pulau Jawa dan Bali Teknik Analisis Data: - Analisis Data Panel	Pertumbuhan Ekonomi memeiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	JDEP Vol. 5 No. 2 (2022) hlm. 146-172
14.	Sri Muthia Andini, Husni Shabri (2024) “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”	Variabel Independen: - Investasi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: - PDRB Tempat Penelitian: - Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Teknik Analisis Data: - Analisis Jalur	Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD	Jurnal Al-Intifaq Volume 4, Nomor 1, April 2024
15.	Risna Wati Sirait (2019) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin”	Variabel Independen: - Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah	Tempat Penelitian: - Kabupaten Merangin\ Teknik Analisis Data: - Analisis Regresi Sederhana	Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD	Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 8 No.2 (2019), p-ISSN: 2252-8636 e-ISSN: 2685-9424
16.	Alisman, Ummu Hanif, Dedi Sufriadi (2022) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik,	Variabel Independen: Invesatsi Variabel Dependen:	Variabel Independen: - Pengeluaran Pemerintah - PDRB	Invesatsi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen,

	Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat”	• Pendapatan Asli Daerah	Ruang Lingkup Investasi: • Investasi Publik Tempat Penelitian: • Kabupaten Aceh Barat Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Data Panel	dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 8 (2) November Tahun 2022, Hal 116-124.
17.	Reza Tianto (2022) dengan judul “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah”	Variabel Independen: • Investasi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Tempat Penelitian: • 34 Provinsi di Indonesia Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Data Panel	Jumlah angkatan kerja dan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13 No. 1, Jan. 2022, P-ISSN 2089-1989, E-ISSN 2614-1523
18.	Zainuddin Rahman dan Sumarni (2024) dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”	Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: • Belanja Daerah Variabel Dependen: • Pertumbuhan Ekonomi Tempat Penelitian: • Kota Makassar Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Sederhana	Belanja daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
19.	Muhammad Danan Riyadi, Nenik Woyanti (2022) “Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat”	Variabel Independen: • Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah tempat: • Provinsi Jawa Barat	Ruang Lingkup Investasi: • Investasi pihak swasta Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol.12, No.1, 2022, pp: 13-26, ISSN 2580-9482
20.	Elidawaty Purba dan Ekayanty Manurung (2023)	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Jurnal Ekonomi Pembangunan

	dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar”	• Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Jumlah Penduduk Tempat Penelitian: • Kota Pematang Siantar	positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematang Siantar	n, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, E-ISSN 2614-7181
			Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Linier Berganda		
21.	Eve Ida Malau (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar”	Variabel Independen: • Pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tempat Penelitian: • Kota Pematangsiantar Teknik Analisis Data: • Analisis Regresi Sederhana	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Pematangsiantar	Jurnal riset multidisplin edukasi, Vol. 1 No. 2 tahun 2024, Hal. 122-132, E- ISSN 3062- 9624
Mohamad Ilham Al Akbarsyach (2024) “Pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2019-2023					

2.3 Kerangka Pemikiran

Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menjelaskan bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatannya melalui investasi- investasi baru sebagai tambahan stok modal untuk menumbuhkan perekonomian dalam jangka panjang yang pada gilirannya, akan memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan suatu daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan dasar pengenaan sumber PAD.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana ini merupakan indikator perhitungan PAD suatu daerah, terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor asli milik daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Suatu daerah yang memiliki perolehan PAD tinggi akan menghasilkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi pula khususnya kemandirian secara ekonomi sehingga daerah tersebut dapat dikatakan memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang baik (Nenang, et al.,2018).

Ulasan tersebut diperkuat melalui penelitian dari Muhammad Danan Riyadi, dan Nenik Woyanti (2022) dengan judul penelitian “Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat”. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap pertambahan Pendapatan Asli Daerah sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,013905% serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), dan Siagian (2018) dimana pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah positif dan signifikan. PAD merupakan salah satu sumber dana untuk pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Sehingga

pemerintah daerah harus berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, guna meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator umum yang berguna dalam mengukur kemajuan atau pertumbuhan perekonomian sebuah negara atau wilayah (Sirait:2019).

Dalam beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian dari Muhammad Syahroni, dan Oryza Ardhiarisca (2023) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hasna Imtiyaz Hanifah, dan Agus Sunarya Sulaeman (2022), Risna Wati Sirait (2019), Ayu Desmawati, Zamzami, dan Zulgani (2015), dan M. Zahari MS (2015). Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian dari Faishal Fadly (2016), dan Rahmah Muin (2016) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PAD.

Untuk memacu proses Pertumbuhan Ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*) sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Harrod-Domar. PP Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan dana ataupun Barang Milik Daerah (BMD) dengan periode yang lama oleh pemerintah daerah untuk melakukan investasi dengan membeli surat berharga maupun investasi langsung, sehingga dapat mengembalikan nilai pokok yang memiliki manfaat secara ekonomi, sosial, atau manfaat lain dalam periode tertentu.

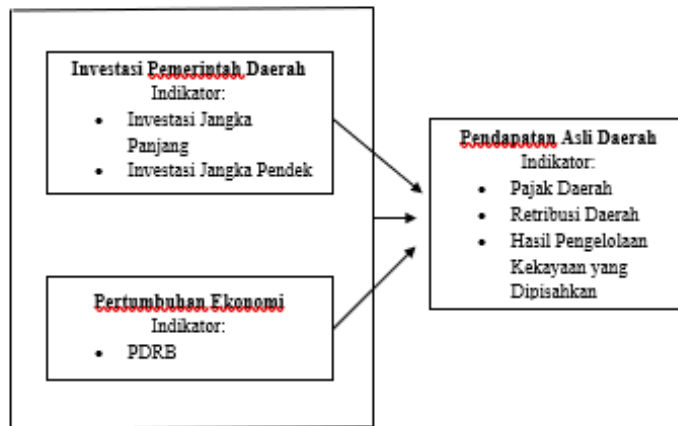
Pasal 71 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengklasifikasikan investasi berdasarkan jangka waktu yaitu investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan dan investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen.

Dalam beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dari Darwanis, dan Ryanda Saputra (2014), Lastri Putri BR Sijabat, Raisa Yamani, Ahmad Albar Tanjung, dan Sukardi (2024), Theodora Ririn, Rida Prihatni, dan Yunika

Murdayanti (2014), Meuthia Sri Agustin, Sri Minarti, dan Felisitas Defung (2023), Rakhmat Haryono, dan Heri Nugraha (2022), Ida Bagus Ketut Yuda Kartana, dan Made Heny Urmila Dewi (2022), Sri Muthia Andini, dan Husni Shabr (2024), Alisman, Ummu Hanif dan Dedi Sufriadi (2022) mendapatkan hasil bahwa investasi pemerintah dalam berbagai bidang berbeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Sedangkan menurut penelitian dari Ifrizal, Darwanis, dan Sulaiman (2014), Muhammad Syaifuddin Jihansyah, dan Ni Nyoman Yuliarmi (2019), menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Berbeda dari hasil penelitian sebelumnya, menurut penelitian dari Wardatul Husna, Reza Juanda, Saharuddin, dan Murtala (2024), Wenni Febriana E. Sueni, Mesak Iek, Rachmaeny Indahyani, dan Antonia Klara (2019) menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap PAD.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah” Dengan Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 dapat digambarkan dengan konsep kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Berpengaruh secara parsial
 ————— Berpengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada identifikasi masalah penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara parsial
2. Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara simultan.